



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## STABILISASI HARGA BERAS

**Rasbin**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rasbin@dpr.go.id](mailto:rasbin@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Tren harga beras di pasar terus mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Tangerang, harga beras medium sudah menyentuh Rp13.000,00-Rp13.800,00 per kg. Kisaran harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp10.900,00 per kg. Harga beras premium di Pasar Darma Kabupaten Kuningan Jawa Barat, naik menjadi Rp14.000,00 per kg, dari harga sebelumnya Rp13.500,00 per kg. Begitu juga beras medium naik dari Rp13.000,00 menjadi Rp13.500,00 per kg. Sedangkan harga beras termurah sudah berada pada level Rp13.000,00 per kg atau naik Rp500,00 per kg. Kenaikan harga beras juga terjadi di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat. Di Pasar Johar, harga beras rata-rata naik sampai Rp2000,00 per kg.

Salah satu penyebab naiknya harga beras adalah terbatasnya pasokan gabah. Kondisi ini disebabkan siklus produksi padi sedang berada di musim panen gadu (mengandalkan hujan/tadah hujan), sehingga produksi padi jauh lebih rendah dari panen raya. Selain itu, kondisi tersebut juga tak lepas dari cuaca ekstrem (El Nino) yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya El Nino berpotensi memengaruhi produksi padi nasional. Di samping itu, El Nino dapat memengaruhi negara-negara yang selama ini menjadi pengekspor beras ke Indonesia seperti India, Kamboja, dan Bangladesh. Negara-negara tersebut berpotensi menghentikan ekspor beras demi mengamankan kebutuhan pangan dalam negerinya. Berdasarkan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), neraca produksi padi bulanan pada Agustus hingga Desember 2023 akan mengalami defisit. Secara bulanan, defisit produksi padi pada Januari 2023 mencapai 1,2 juta ton; bulan Juli 2023 mengalami defisit sebesar 0,13 juta ton; Agustus 2023 defisit 0,23 juta ton; September 2023 defisit 0,09 juta ton; dan Oktober 2023 0,27 juta ton.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah harus secepatnya mengendalikan kenaikan harga beras. Hal ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi menjaga tingkat inflasi nasional. Tingginya harga beras dapat menyebabkan inflasi naik di atas target pemerintah pada tahun 2023 ini, yaitu 3%+1%. Secara akumulasi, inflasi beras sudah mencapai 8% selama periode Januari-Agustus 2023. Kondisi ini bisa berimbas pada inflasi umum yang pada saat ini sudah mengalami kenaikan. Selain inflasi, kenaikan harga beras juga berpotensi meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan kesempatan kerja, juga dipengaruhi oleh harga komoditas termasuk beras. Menurut Maliki, Direktur Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, kenaikan harga beras pada delapan tahun lalu, sekitar 10%, dapat meningkatkan angka kemiskinan 300 ribu orang. Oleh karena itu, saat ini pemerintah perlu melakukan stabilisasi harga beras.

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sehingga dapat terkendali. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar yang mencakup ritel hingga grosir. Perum Bulog menggelontorkan stok

berasnya ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mulai 13 September 2023 sekitar 1.000-3.000 ton dalam satu minggu terakhir. Harapannya, beras yang digelontorkan berupa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersebut dapat mengisi kebutuhan pasar dan menekan laju harga beras. Di samping itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mengantisipasi kenaikan harga beras. Naiknya harga beras berpotensi meningkatkan harga bahan pokok lainnya. Kemendag harus segera melakukan pengecekan di lapangan agar mengetahui faktor penyebab kenaikan harga beras.

## Atensi DPR

Stabilisasi harga beras penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi menjaga inflasi dan menghambat laju peningkatan orang miskin. DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendag untuk mengantisipasi kenaikan harga beras. Kemendag harus turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung realita kenaikan harga beras. Mulai dari harga, ketersediaan, sampai faktor-faktor penyebab kenaikan harga beras. Selain itu, Kemendag perlu melakukan operasi pasar, baik mandiri ataupun bekerja sama dengan instansi lain seperti Perum Bulog. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI juga perlu turun ke lapangan secara langsung untuk mengecek komoditas beras baik harga maupun ketersediaannya. Selain itu, juga untuk mengecek bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga beras tersebut.

## Sumber

*Investor Daily*, 14 September 2023;  
*Kompas*, 15 September 2023;  
*Kontan*, 15 September 2023;  
*Rakyat Merdeka*, 17 September 2023.